

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH DI INDONESIA

TANTANGAN, IMPLEMENTASI, DAN ARAH PENGEMBANGAN

Dahliah¹, Nurhidayah², Bagus Pujiyanto³, La Ridwan⁴, Syumardi⁵, Norma⁶,
Sirajuddin Saleh⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri
Makassar

dahliah.250014301002@student.unm.ac.id¹, yayanurhidayah70@gmail.com²,
baguspujiyanto13@gmail.com³, ridwanwasamba@gmail.com⁴,
Syumardispd@gmail.com⁵, Norma.s22025@student.unm.ac.id⁶,
sirajuddinsaleh@unm.ac.id⁷

ABSTRACT

Secondary education plays a strategic role in the development of human resources in Indonesia. This article aims to analyze secondary education policies in Indonesia, covering the regulatory framework, policy implementation, challenges encountered, and future development directions. This study employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on regulations, scholarly articles, as well as reports from national and international institutions. The findings indicate that since the enactment of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, there have been significant policy developments. However, policy implementation continues to face various challenges, including disparities in educational quality across regions, limited infrastructure, unequal distribution of teaching personnel, and a mismatch between curriculum and labor market demands. The main findings reveal that the core issues in secondary education policy lie not only in regulatory aspects but also in disparities in implementation across regions, institutional capacity, and the readiness of human resources in the education sector. Therefore, future policy development should focus on expanding equitable access, improving the quality of learning, strengthening governance, and integrating digital technology into education. This article contributes by providing a critical synthesis of secondary education policies as a basis for formulating more adaptive and sustainable policy directions.

Keywords: *education policy 1, secondary education 2, policy implementation 3, education quality 4, policy analysis 5*

ABSTRAK

Pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan menengah di Indonesia, mencakup kerangka regulasi, implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta arah pengembangannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang bersumber dari regulasi, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga nasional dan internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah terjadi berbagai perubahan kebijakan yang signifikan. Namun, implementasi kebijakan

masih menghadapi berbagai kendala, seperti disparitas kualitas antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Temuan utama menunjukkan bahwa persoalan utama kebijakan pendidikan menengah tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada kesenjangan implementasi antarwilayah, kapasitas kelembagaan, serta kesiapan sumber daya manusia pendidikan. Oleh karena itu, arah pengembangan kebijakan perlu difokuskan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan tata kelola, serta integrasi teknologi digital dalam pendidikan. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan sintesis kritis terhadap kebijakan pendidikan menengah sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan 1, pendidikan menengah 2, implementasi kebijakan 3, mutu Pendidikan 4, analisis kebijakan 5)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa. Di Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan menengah memiliki posisi penting sebagai jembatan antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, serta sebagai tahap persiapan peserta didik untuk memasuki dunia kerja.

Pendidikan menengah mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan spesifik. Dalam dua dekade terakhir, pemerintah telah

mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan tata kelola pendidikan menengah, seperti Program Wajib Belajar 12 Tahun, Program Indonesia Pintar (PIP), Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, serta revitalisasi SMK. (Chang, Mae Chu; Shaeffer, Sheldon; Al-Samarrai, Samer; Ragatz, Andrew; De Ree, Joppe; Stevenson, 2014).

Meskipun berbagai studi telah membahas pendidikan menengah di Indonesia, kajian yang secara khusus menghubungkan aspek regulasi, implementasi, tantangan struktural, dan arah pengembangan kebijakan masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi celah tersebut

melalui analisis kebijakan pendidikan menengah secara integratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan. bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan menengah di Indonesia secara komprehensif, meliputi kerangka regulasi, implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta arah pengembangan di masa depan.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkeadilan.

1. Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari kebijakan publik yang berfungsi mengarahkan penyelenggaraan pendidikan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. (Tilaar, H. A. R.; Nugroho, 2009) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan mencakup seluruh aspek pengaturan pendidikan, mulai dari tujuan, isi, proses, hingga evaluasi hasil pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki

dimensi operasional yang berdampak langsung pada praktik pendidikan. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan memiliki karakter yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan memerlukan pendekatan multidimensional yang mampu memahami interaksi antara berbagai faktor tersebut.

(Ball, 1994) mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dipahami hanya sebagai dokumen formal, melainkan sebagai proses yang berlangsung dalam tiga konteks utama, yaitu konteks pengaruh (context of influence), konteks produksi teks kebijakan (context of policy text production), dan konteks praktik (context of practice). Ketiga konteks ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana kebijakan diimplementasikan di lapangan.

2. Pendidikan Menengah dalam Perspektif Kebijakan

Pendidikan menengah memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan karena menjadi penghubung antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, serta sebagai tahap persiapan memasuki dunia kerja. Di Indonesia, pendidikan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pentingnya pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Dalam konteks global, pendidikan menengah juga menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. UNESCO (2015) melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 4, menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan menengah yang inklusif, berkualitas, dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan menengah tidak hanya menjadi tanggung jawab nasional, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen global.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan menengah memiliki pengaruh signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara (Hanushek, Eric A.; Woessmann, 2015). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan menengah perlu dirancang secara komprehensif untuk memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

3. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, karena menentukan sejauh mana kebijakan yang dirumuskan dapat diwujudkan dalam praktik. (Van Meter, Donald S.; Van Horn, n.d.) mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta resistensi terhadap perubahan. (Fullan, 2007) menekankan bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat bergantung pada kapasitas aktor pelaksana, terutama guru dan pimpinan sekolah, dalam mengelola perubahan.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh (Chang, Mae Chu; Shaeffer, Sheldon; Al-Samarrai, Samer; Ragatz, Andrew; De Ree, Joppe; Stevenson, 2014) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor politik dan kapasitas kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kondisi implementasinya di lapangan.

4. Tantangan Pendidikan Menengah di Indonesia

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan menengah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. (Suryadarma, Daniel; Jones, 2013) mengidentifikasi adanya ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah sebagai salah satu masalah utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Selain itu, laporan dari World Bank

(2020) dan UNICEF (2021) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan infrastruktur, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, serta rendahnya kualitas pembelajaran menjadi faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa.

Dari sisi relevansi, (OECD, 2019) melalui hasil PISA menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara lain. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pendidikan, termasuk pendidikan menengah, belum sepenuhnya mampu menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan di era global.

5. Arah Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pengembangan kebijakan pendidikan menengah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas, pemerataan akses, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. (World Bank, 2018).

menekankan pentingnya pendekatan berbasis sistem dalam reformasi pendidikan, yang mencakup penguatan tata kelola, peningkatan kualitas guru, serta penggunaan data dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga mendorong perlunya transformasi dalam sistem pendidikan. (Duong, 2021) menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama dalam konteks pembelajaran jarak jauh.

Penguatan kemitraan antara dunia pendidikan dan industri juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan relevansi lulusan. (Frenk, n.d.) menekankan pentingnya integrasi antara pendidikan dan dunia kerja untuk menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif dan kompetitif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan menengah perlu dianalisis sebagai proses yang melibatkan regulasi, aktor pelaksana, kapasitas kelembagaan, dan konteks sosial ekonomi. Kebijakan yang baik tidak hanya ditentukan oleh kejelasan

regulasi, tetapi juga oleh kemampuan implementasi di tingkat sekolah dan daerah. Oleh karena itu, kajian ini menggunakan perspektif kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan, dan pemerataan mutu pendidikan sebagai dasar analisis

B. Metode Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan seleksi sumber berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilakukan pembacaan mendalam (in-depth reading) untuk memahami substansi dari setiap sumber, diikuti dengan pencatatan poin-poin penting dan pengelompokan informasi berdasarkan tema analisis.

Tahap akhir adalah sintesis dan interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber literatur yang berbeda. Selain itu,

dilakukan pula cross-check terhadap data dan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya, guna memastikan konsistensi dan akurasi analisis yang dihasilkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kerangka Regulasi Kebijakan Pendidikan Menengah di Indonesia

Kerangka regulasi pendidikan menengah di Indonesia menunjukkan struktur yang sistematis dan berlapis, yang mencerminkan kuatnya komitmen negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, sekaligus kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi fondasi utama yang mengatur seluruh aspek pendidikan, termasuk pendidikan menengah. Regulasi ini kemudian dijabarkan

melalui berbagai peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Regulasi-regulasi tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif dalam menjamin mutu pendidikan secara nasional.

Namun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan regulasi yang kuat tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasinya. (Ball, 1994) menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai teks formal, tetapi juga sebagai praktik yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengubah lanskap pengelolaan pendidikan menengah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi.

Desentralisasi ini memiliki dua implikasi utama. Di satu sisi, kebijakan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal. Namun di sisi lain, desentralisasi juga berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, terutama antara daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan rendah (World Bank, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi yang baik masih memerlukan dukungan kapasitas institusional yang memadai agar dapat diimplementasikan secara optimal.

Selain itu, kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun menjadi salah satu bentuk intervensi strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya memperluas cakupan pendidikan, tetapi juga merepresentasikan upaya negara dalam memenuhi target global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Goal 4 tentang pendidikan berkualitas (UNESCO, 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi pendidikan menengah di Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi serta kapasitas kelembagaan di tingkat daerah.

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Menengah

Implementasi kebijakan pendidikan menengah di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kontekstual. Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan kebijakan, sumber daya, serta kondisi lingkungan sosial (Van Meter, Donald S.; Van Horn, n.d.).

Dari aspek akses, implementasi kebijakan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya perluasan akses pendidikan (World Bank, 2020).

Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu instrumen kebijakan yang efektif dalam mengurangi hambatan ekonomi bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu (Mirani, D.; Agustina, S.; Desiyana, 2018).

Namun demikian, peningkatan akses tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks mutu pembelajaran, implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan abad ke-21. Kurikulum ini menekankan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, penguatan karakter, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis (Heyward, 2018)

Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi kurikulum sering kali menghadapi kendala di tingkat sekolah, terutama terkait dengan kesiapan guru dan keterbatasan sumber daya. (Fullan, 2007) menegaskan bahwa perubahan dalam sistem pendidikan memerlukan dukungan kapasitas yang memadai,

terutama dalam hal kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah. Dalam praktiknya, tidak semua sekolah memiliki kapasitas yang sama dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum secara efektif.

Selain itu, program revitalisasi SMK yang bertujuan meningkatkan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri juga menghadapi tantangan. Meskipun program ini telah mendorong kemitraan antara sekolah dan dunia industri, kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar kerja masih menjadi persoalan (Frenk, n.d.)

Dalam konteks tata kelola, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi sejak tahun 2017 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam koordinasi antarlevel pemerintahan serta kapasitas manajerial di daerah.

Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan menengah di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan, namun masih

menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian serius, terutama dalam aspek kualitas dan pemerataan.

3. Tantangan dalam Kebijakan Pendidikan Menengah

Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, pendidikan menengah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang kompleks dan bersifat multidimensional.

Salah satu tantangan utama adalah disparitas kualitas pendidikan antarwilayah. Data menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah Jawa dan luar Jawa (UNICEF, 2021). Disparitas ini tidak hanya mencakup aspek infrastruktur, tetapi juga kualitas guru, akses terhadap teknologi, serta capaian belajar siswa. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) juga menunjukkan bahwa performa siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD (OECD, 2019).

Selain itu, distribusi tenaga pendidik yang tidak merata menjadi masalah krusial. Banyak daerah terpencil mengalami kekurangan guru, sementara di daerah perkotaan terjadi kelebihan tenaga pendidik. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran (Chang, Mae Chu; Shaeffer, Sheldon; Al-Samarrai, Samer; Ragatz, Andrew; De Ree, Joppe; Stevenson, 2014). Lebih lanjut, kompetensi guru dalam menghadapi tuntutan pembelajaran abad ke-21 juga masih menjadi tantangan, terutama dalam hal literasi digital dan pedagogi inovatif.

Tantangan lainnya adalah relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi kurikulum, tingkat pengangguran terbuka di kalangan lulusan pendidikan menengah masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan adanya mismatch antara kompetensi yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dengan kebutuhan industri (OECD, 2019). Dari sisi pembiayaan, meskipun alokasi anggaran pendidikan telah mencapai 20% dari APBN/APBD, distribusi dan pemanfaatannya belum sepenuhnya

efektif. Banyak sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan fasilitas, yang berdampak pada kualitas proses pembelajaran (World Bank, 2018).

Dengan demikian, tantangan dalam pendidikan menengah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, yang memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

4. Arah Pengembangan Kebijakan Pendidikan Menengah

Berdasarkan berbagai tantangan yang diidentifikasi, arah pengembangan kebijakan pendidikan menengah ke depan perlu difokuskan pada beberapa aspek strategis.

Pertama, penguatan kebijakan afirmasi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kebijakan ini dapat berupa pemberian insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, pembangunan infrastruktur pendidikan, serta perluasan akses pendidikan berbasis teknologi. Pendekatan ini penting untuk memastikan pemerataan kualitas Pendidikan. (World Bank, 2018)

Kedua, integrasi teknologi digital dalam pembelajaran perlu ditingkatkan. Pandemi COVID-19 telah menunjukkan pentingnya digitalisasi dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu mendorong penguatan literasi digital, baik bagi siswa maupun guru (Duong, 2021).

Ketiga, penguatan kemitraan antara pendidikan dan dunia industri menjadi sangat penting dalam meningkatkan relevansi lulusan. Model pembelajaran berbasis kerja (work-based learning) dan sistem ganda (dual system) dapat menjadi alternatif dalam menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja (Frenk, n.d.)

Keempat, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama. Guru merupakan aktor kunci dalam implementasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pengembangan profesional guru secara berkelanjutan sangat diperlukan (Fullan, 2007).

Secara keseluruhan, arah pengembangan kebijakan pendidikan menengah harus bersifat adaptif,

inklusif, dan berorientasi pada masa depan, dengan mempertimbangkan dinamika global dan kebutuhan lokal secara simultan.

D. Kesimpulan

Pendidikan menengah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Berbagai kebijakan telah diimplementasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses, kualitas, serta relevansi pendidikan, yang menunjukkan adanya komitmen kuat dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti disparitas kualitas antarwilayah, keterbatasan sumber daya, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, dinamika global yang ditandai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar kerja menuntut sistem pendidikan untuk lebih responsif dan fleksibel. Tantangan ini semakin menegaskan bahwa kebijakan

pendidikan menengah tidak hanya perlu berfokus pada perluasan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi kurikulum secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif, berbasis teknologi, serta berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Penguatan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran, peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pendidik, serta pengembangan kemitraan antara dunia pendidikan dan industri menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan. Dengan demikian, pendidikan menengah diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan menengah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menghubungkan regulasi nasional dengan kapasitas implementasi di tingkat daerah dan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ball, S. J. (1994). *Education reform: A critical and post-structural approach*. Open University Press.

Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). Teachers College Press.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press.

Suryadarma, D., & Jones, G. W. (2013). *Education in Indonesia*. ISEAS Publishing.

Tilaar, H. A. R., & Nugroho, R. (2009). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Artikel in Press :

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan implementasi*. Kemendikbudristek

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). *Revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK)*. Kemendikbud.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013

tentang Standar Nasional Pendidikan.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and framework for action*. UNESCO.

UNICEF. (2021). *Education inequality in Indonesia*. UNICEF. <https://www.unicef.org>

Jurnal :

Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A., De Ree, J., & Stevenson, R. (2014). *Teacher reform in Indonesia: The role of politics and evidence in policy making*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0189-2>

Duong, D., et al. (2021). Innovation in education systems. *BMJ Innovations*. <https://doi.org/10.1136/bmjinnov-2021-000708>

Frenk, J., et al. (2022). Future of education and workforce readiness. *The Lancet*, 400(10358), 1235–1247. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)02092-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02092-X)

Heyward, M. (2018). Curriculum reform in Indonesia: Policy and practice. *Journal of Education Policy*, 33(4), 1–15.

Mirani, D., Agustina, S., & Desiyana, F. S. (2018). Implementation of Smart Indonesia Program.

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 191, 112–118.
<https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.27>

Mustika, R., Nishigori, H., Ronokusumo, S., & Scherpbier, A. (2019). Education system challenges in Indonesia. *TAPS*, 4(1), 1–9.
<https://doi.org/10.29060/taps.2019-41/gp1077>

OECD. (2019). *PISA 2018 results (Volume I): What students know and can do*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

World Bank. (2018). *Growing smarter: Learning and equitable development in East Asia and Pacific*. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1261-4>

World Bank. (2020). *The promise of education in Indonesia*. World Bank.
<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1320-8>